

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	2	3	5	6	7
1.	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
2.	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
3.	Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
4.	Identitas PNS yg mengajukan izin perceraian / perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
5.	Daftar Nilai DP-3 PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	-Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama Berlaku
6.	Data Rekam Medis PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h - Permenkes RI No.269/MENKES/ PER/III/2008 tentang Rekam Medis Ps 10	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	-Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia -Melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	Selama Berlaku

7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000 	Mengganggu menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Selama Berlaku
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama Berlaku
9.	Dokumen penawaran kontrak.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf l dan j - Perpres No. 54 Th.2010 tlg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian	Selama Berlaku
10.	Laporan Hasil Pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah - Permenpan No.PER/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Permendagri No.28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a) 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Selama Berlaku

11.	Bukti Tindak Lanjut LHP.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Intern Pemerintah - Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Permendagri No.28 th 2007 tentang norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a) - Permenpan No.9 th 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen Instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik	Selama Berlaku
12.	Lokasi Server	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30-37)	Tindak kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama Berlaku
13.	Internet Protocol/IP Adress Rivate	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30)	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Melindungi/ mengamanka perangkat serta data	Selama Berlaku
14.	Banwidth Management	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.30-37)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Selama Berlaku
15.	Kode Akses Elektronik	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps.1-16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama Berlaku
16.	Sistem Keamanan Elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama Berlaku

17	Dokumen Uji Kendaraan	1. UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 250 2. UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 3. PP No. 55 Tahun 2012 - Bag Ketiga (Uji Berkala) 4. PM No. 133 Tahun 2015 Bab X Pasal 73 dan 74 5. Perda No. 12 Tahun 2012 6. Perda No. 19 Tahun 2012	Mengganggu / Menghambat Proses Pelayanan	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	Selama Berlaku
----	-----------------------	---	--	---	----------------

Purwokerto, Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS SRIYONO, AFD, S.IP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196708011992031006